



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
(D P P K B)

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026



KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah selesai disusun tepat waktu. Rencana Strategis mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Rencana Strategis tersebut tetap merupakan jabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang memuat Visi dan Misi Pemerintah 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC). Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman peningkatan kinerja Dinas dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN dalam menyelenggarakan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada tim penyusun, para pakar dan semua pihak yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Renstra Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai yang diharapkan.



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**

Akhirnya dengan telah disusunnya Rencana Strategi (RENSTRA) ini diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dapat mencapai target kinerja. Memberikan kontribusi bagi kepentingan unsur aparat pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kabupaten Toba dalam rangka “***Terwujudnya Toba Unggul dan Bersinar***”.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026. Semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Balige, 2021

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Toba

HERBET SP. PASARIBU, S.Si, Apt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602031997031002



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i-ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8-24
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	29-35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	29
3.2 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	32
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategi	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	37-38
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39-40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	41-46
VI.1 Rencana Program	41
VI.2 Kegiatan	41
VI.3 Pendanaan	46
BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	47-48
BAB VIII PENUTUP	49-50



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 Tahun ke depan.

Dalam pemerintahan lebih dikenal rencana strategis ini dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

RPJMD dan RKD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2021 – 2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar.

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun (Tahun 2021-2026) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Toba, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor



- 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba;
20. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir;
21. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Toba Tahun 2021-2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



- Kabupaten Toba, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang memuat program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala/Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup



BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 20 menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan disebutkan bahwa strategi pelaksanaan grand design pembangunan kependudukan dilakukan melalui:

- pengendalian kuantitas penduduk;
- peningkatan kualitas penduduk;
- pembangunan keluarga;
- penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- penataan administrasi kependudukan.

Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah



melakukan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan; pengaturan kehamilan yang diinginkan; pembinaan kesertaan keluarga berencana; peningkatan kesejahteraan keluarga; penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan peningkatan pendidikan dan peran wanita. Sedangkan penurunan mortalitas dilakukan melalui penurunan angka kematian ibu hamil; penurunan angka kematian ibu melahirkan; penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan penurunan angka kematian bayi dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 jo. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Samosir, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Renstra, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;



- c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga PLKB/PKB dan kader KB;
- i. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pelayanan KB;
- k. pembudayaan dan pengembangan KB, Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
- l. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- n. pembinaan dan pendayagunaan kelompok jabatan fungsional.

Sedangkan Rincian dan Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

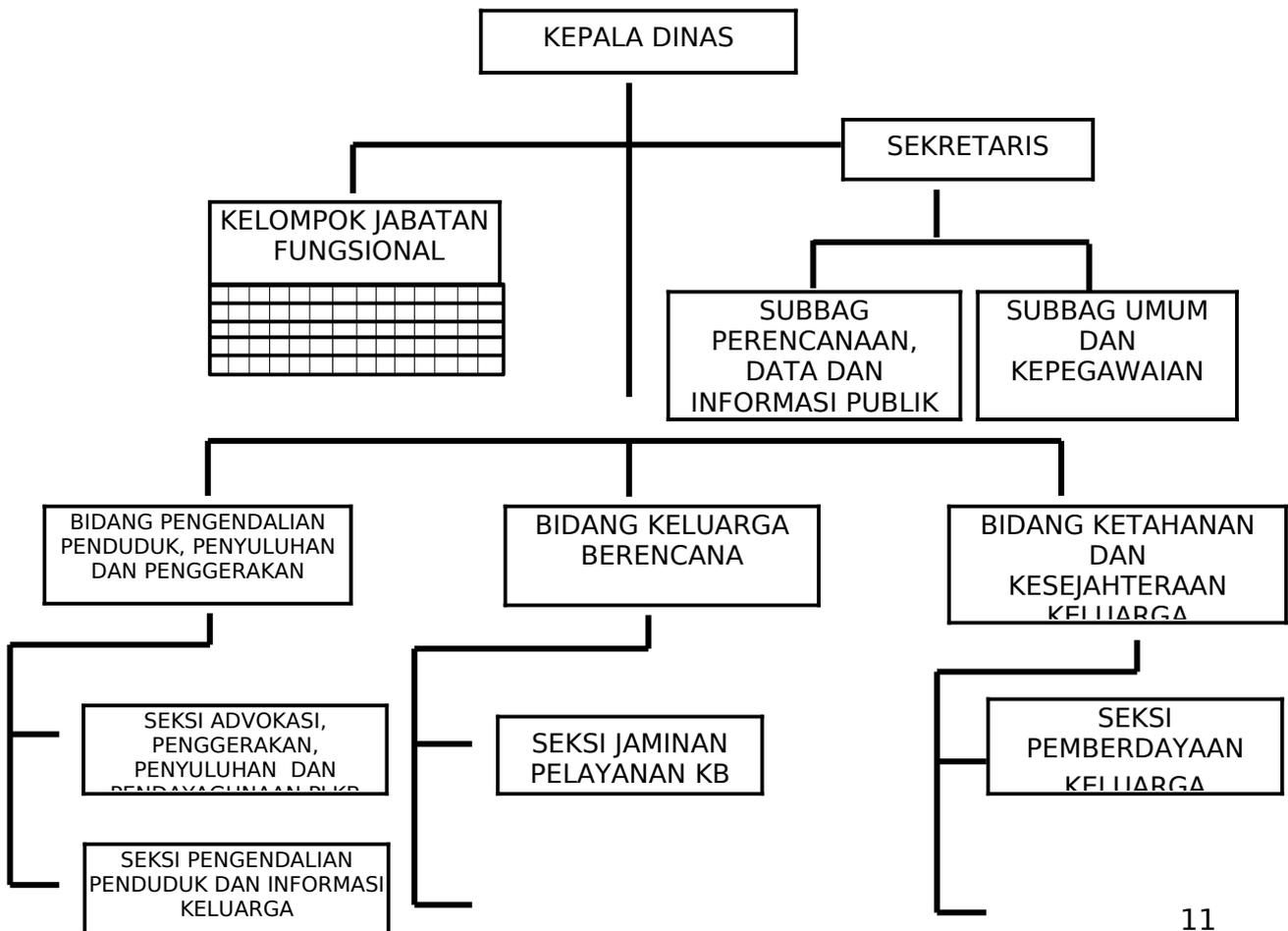
- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana serta kelompok jabatan fungsional;



- c. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1.2 Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA





SEKSI JAMINAN
KESERTAAN KB

SEKSI BINA
KETAHANAN
KELUARGA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Toba di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu:

- 1) Sekretaris;
- 2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana;
- 4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kepegawaian

Berdasarkan tugas dan fungsinya, pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba terdiri dari :



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**

1. Pejabat Tinggi Pratama (Eselon II);
2. Pejabat Administrator (Eselon III dan IV);
3. Pejabat Fungsional Umum (Staf).

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba sebanyak 23 orang terdiri:

- Pria = 8 orang;
- Wanita = 15 orang.

Sumber Daya Manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita
1.	S-2	2 orang	2 orang
2.	S-1	4 orang	9 orang
3.	D-3	- orang	3 orang
4.	SMA	2 orang	1 orang
	Jumlah	8 orang	15 orang

Berdasarkan dari pangkat dan golongan sebagai berikut:

Uraian	Golongan									
	IV. c	IV. b	IV. a	III. d	III. c	III. b	III. a	II. d	II. c	II. b
Laki-Laki	-	2	-	-	1	2	1	2	-	-
Wanita	1	-	3	5	-	2	2	1	-	-
Honor er	9 orang									

Pegawai menurut Eselon :

			Diklat Struktural	Pendidikan
--	--	--	-------------------	------------



No.	Jabatan	Eselon	PIM	PIM	PIM	Belum Dikla	SLT P	SLT A	D 3	S1	S2
1.	Kepala Dinas	II-b	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	III-a	-	-	-	1	-	-	-	1	-
3.	Kabid	III-b	-	-	-	3	-	-	-	3	-
4.	Kasubbag/ Kasi	IV-a	-	-	2	6	-	1	-	5	2
5.	Fungsional Umum	-	-	1	-	-	-	2	3	4	1

b. Tenaga Program

Dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak hanya ditunjang tenaga intern Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun juga ditunjang oleh tenaga ekstern diantaranya tenaga medis dari Klinik KB Pemerintah dan Swasta. Pada sisi lain, guna menunjang pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi program Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ditunjang oleh tenaga dari unsur masyarakat yang terdiri dari Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD.

Potensi yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a) Cakupan pelayanan berdasarkan data Desember 2020 :
 - Jumlah PUS : 24.937 pasangan



- Partisipasi KB : 77,30 %
- *Un Met Need* : 11,80 %

b) Jangkauan Pelaksanaan Program, semua wilayah se Kabupaten Toba merupakan obyek pelaksanaan program Keluarga Berencana Kabupaten Toba, terdiri dari:

- Kecamatan : 16
- PPKBD : 244
- Sub PPKBD : 732
- Kelompok kegiatan BKB : 244
- Kelompok kegiatan BKR : 16
- Kelompok kegiatan BKL : 16
- Kelompok kegiatan UPPKS : 18
- Kelompok kegiatan PIK R : 19

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba menempati gedung milik Pemerintah Kabupaten Toba yang berlokasi di Jalan Pasar Tambunan No. 02 Desa Lumban Pea Tambunan Kecamatan Balige dengan luas bangunan 600 m² dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada :

- ♦ Mobil Kijang Inova = 1 unit
- ♦ Mobil Unit Pelayanan KB = 1 unit
- ♦ Mobil Pengangkut Akseptor (Mini Bus) = 1 unit
- ♦ Sepeda Motor = 27 unit
- ♦ Mesin Fotocopy = 1 unit
- ♦ Laptop/Note Book = 10 unit
- ♦ Komputer PC = 9 unit



- ♦ Proyektor LCD = 3 unit
- ♦ Publik Address = 1 set

Selain prasarana tersebut, guna menunjang program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga ditunjang dengan adanya Gudang Alokon (Alat, Obat dan Kontrasepsi) berlokasi di tempat yang sama. Prasarana di Tingkat Kecamatan telah disediakan 16 Balai Penyuluhan KB Kecamatan untuk 16 Kecamatan.

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba telah diinventarisir pada Kartu Inventaris Barang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin
 - a. Alat-alat Besar
 - b. Alat-alat angkutan
 - c. Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d. Alat Pertanian
 - e. Alat kantor dan rumah tangga
 - f. Alat Studio dan Alat Komunikasi
 - g. Alat-alat kedokteran
 - h. Alat Laboratorium
 - i. Alat Keamanan



2. Gedung dan Bangunan
3. Asset Tetap Lainnya.

Kelengkapan sarana prasarana tersebut berupaya digunakan secara maksimal untuk menunjang kelancaran tugas baik di lingkungan kantor, maupun di masing-masing wilayah kerja Penyuluh KB. Namun demikian, beberapa kebutuhan sarana prasarana yang umur ekonomisnya terus berkurang, semisal printer dan komputer/laptop, harus terus diperhabarui, baik melalui pemeliharaan (service) maupun pembelian baru.

2.2.3 Anggaran

Sumber anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik/Non Fisik. Tingkat perkembangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) per-Tahun diuraikan sebagai berikut (Tabel T-C.24) :



Berdasarkan Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016-2020 tersebut di atas, rata-rata realisasi antara Tahun 2016-2020 sebesar 86,07% namun tingkat serapan mengalami naik turun. Pada Tahun 2019 tingkat serapan anggaran dibandingkan dengan Tahun-Tahun lainnya tergolong paling baik, pagu anggaran sejumlah Rp. 12.708.106.900,00 mengalami realisasi sebesar Rp. 11.818.166.819,00 dengan persentase serapan sebesar 93%. Sedangkan tingkat serapan anggaran paling rendah adalah Tahun 2017, jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 7.772.030.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.011.082.875,00 dengan persentase serapan sebesar 77%. Semakin menurunnya tingkat serapan tersebut disebabkan adanya efisiensi perjalanan dinas luar daerah, dimana pada kegiatan tersebut terdapat ketimpangan antara perencanaan dengan realisasi volume kegiatan yang sulit diperkirakan secara tepat.

Berdasarkan besaran tingkat penurunan serapan realisasi anggaran tersebut masih tergolong kecil dan masih bisa dianggap wajar. Walaupun terdapat naik turun tingkat serapan anggaran pada Tahun 2016-2020



namun seluruh kegiatan bisa dilaksanakan dengan tepat dan baik.

Guna menyikapi kondisi tersebut, maka pada waktu mendatang perlu perumusan perencanaan alokasi anggaran lebih baik dan tepat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat serapan realisasi anggaran.

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan Tahunan.

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.



Secara luas upaya untuk pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Penduduk serta Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan, KB dan KS diantaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi kependudukan dan registrasi vital melalui pendataan keluarga; sensus penduduk dan beberapa survey terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan Kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan bidang KKB.
2. Pelayanan Keluarga Berencana
Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja yang berkualitas bertujuan untuk pengendalian kelahiran penduduk, menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas.
3. Pengembangan Ketahanan dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan keluarga pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjadikan keluarga sejahtera. Dalam upaya pengembangan keluarga sejahtera maka peran kelompok BKB/BKR/BKL, UPPKS, PIK-R sangat diharapkan sebagai corong penyebaran informasi program Bangga Kencana bagi masyarakat, untuk itu dibutuhkan pengembangan kualitas dan kuantitas kelompok Bina



Keluarga (BKB, BKR dan BKL), UPPKS, PIK-R. Data perkembangan BKB, BKR dan BKL UPPKS, PIK-R kedepan dituntut keakuratan dan ketepatan waktu penyajiannya.

Urusan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Urusan tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara alamiah di Kabupaten Toba, yang pada Tahun 2019 mencapai 1,71 persen dan pada Tahun 2020 menurun menjadi 0,63 persen.

Selain itu juga diarahkan untuk meningkatkan jumlah keluarga sejahtera, sebagai salah satu upaya menangani masalah kemiskinan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program dan ketiga program tersebut dijabarkan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan:

- a. meningkatkan cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa;
- b. meningkatkan peran serta perangkat daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB melalui Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).



Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk;
- 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kabupaten/Kota;

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana bertujuan:

- a. menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan KB dan menjamin ketersediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara terjangkau. Pelayanan Medis Operasi Pria (MOP) dan Medis Operasi Wanita (MOW) tersebut pelaksanaannya didanai oleh APBD Kabupaten Toba dan anggaran dari Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara;
- c. meningkatkan kualitas dan keikutsertaan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) meliputi PPKBD/Sub PPKBD dalam program Pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga;
- d. memusatkan pelayanan KB, pelayanan KB bagi keluarga miskin dilaksanakan di puskesmas-



puskesmas secara terpusat setiap 1 (satu) bulan sekali di setiap Kecamatan. Pelayanan KB juga dilaksanakan pada momentum khusus seperti Bulan Bhakti Ikatan Bidan Indonesia (IBI-KB-Kes), TNI KB Terpadu, Hari Jadi Kabupaten Toba serta Kesatuan Gerak PKK KB Kes.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal;
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB);
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota;
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertan ber-KB;

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan:

- a. meningkatkan usia perkawinan remaja, menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 Tahun/age specific fertility rate (ASFR) yang



dilakukan antara lain melalui penyuluhan di Pelatihan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja bagi remaja sekolah dan masyarakat;

- b. meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera;

Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan antara lain:

- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pencapaian Penanganan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera bisa dilihat dari indikator sebagai berikut :

1. Capaian peserta KB Aktif Tahun 2020 mencapai 77,80% dimana pencapaian ini mengalami peningkatan dari Tahun sebelumnya peserta KB Aktif sebesar 75,83%. Pencapaian Tahun 2020 mengalami kenaikan dikarenakan banyak pasangan usia subur yang menopause dan pasangan usia subur muda yang hamil dan menginginkan anak kedua.
2. Capaian peningkatan kader pendamping kelompok kegiatan Tribina, mencapai 294 kelompok, yang terdiri dari 244 Kelompok BKB, 16 Kelompok BKR, 16 Kelompok BKL dan 18 Kelompok UPPKS.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak luput dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang merupakan sasaran pembangunan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Guna tercapainya keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) maka perlu dipilah-pilah sesuai dengan tantangan dan peluang yang nantinya dijadikan rumusan strategi dalam pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang baik dan tepat.

A. Tantangan

Kelestarian ber KB yang terkait dengan capaian penggunaan kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur, tingkat drop out ber KB, dan median usia kawin pertama. Tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Cakupan MKJP khususnya MOW/MOP karena masyarakat di Kabupaten Toba masih memegang budaya patrianialis, harus ada anak laki-laki sebagai generasi penerus;
2. Meningkatkan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) melalui KIE sehingga usia kawin pertama wanita < 20 Tahun mencapai maksimal 10%;



3. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan KB untuk menaikkan angka pemakaian kontrasepsi, sehingga diharapkan TFR akan mengalami penurunan;
4. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi);
5. Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta
6. Meningkatkan penyediaan informasi dan data keluarga yang akurat.

B. Kekuatan

Kekuatan pembangunan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba berdasarkan kondisi lingkungan strategis sebagai berikut:

1. Adanya sumber daya manusia eksternal pengelola program KB (PPKBD/Sub PPKBD, Kelompok Tribina BKB/BKR/BKL, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) yang memadai;
2. Dukungan untuk teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai baik untuk kepentingan internal dan eksternal;
3. Jaringan kemitraan yang kuat dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah;



4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pembangunan Kependudukan, Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang mengharuskan penerapan manajemen prima yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel;
5. Pengerahan atau mobilitas sumber daya yang masih belum optimal membutuhkan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelebagaan budaya kerja.

C. Kelemahan

Kelemahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang sangat kurang dibanding dengan jumlah wilayah binaan yaitu 1 berbanding 10 desa/kel;
2. Tidak ada SDM Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yang memiliki kemampuan IT;
3. Masih tingginya angka Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), sebesar 11,80 persen dari jumlah PUS;
4. Masih rendahnya peserta KB Pria yaitu sebesar 0,32 persen dari total PUS;
5. Masih rendahnya cakupan MKJP sebesar 35 persen dari



total PUS;

6. Metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan pemerintah pusat kepada kabupaten dalam pelaksanaan program KB belum optimal;
7. Sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

D. Peluang

Peluang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Kerjasama lintas sektor (toga toba dan instansi swasta dan pemerintah) yang sudah berjalan cukup baik yang dikuatkan dengan penandatanganan MOU;
2. Memiliki potensi pembinaan kegiatan di wilayah melalui tenaga Petugas Lapangan KB, kader KB dan kelompok kegiatan;
3. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kepesertaan KB, antara lain : pelayanan KB gratis, dan grebek (gerakan bersama) KB dan pemberian reward bagi peserta vasektomi;
4. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui dana DAK dan hibah dari BKKBN;
5. Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi gratis bagi masyarakat miskin.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam Bab IV RPJMD Kabupaten Toba periode Tahun 2021 – 2026, disebutkan beberapa permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Toba, antara lain adalah **“Belum optimalnya pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.”** Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Toba tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing.
- b) Kualitas sumber daya manusia belum mampu berdaya saing.
- c) Belum optimalnya cakupan ketersediaan infrastruktur dasar dan penyelenggaraan penataan ruang.
- d) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Dari beberapa permasalahan pembangunan tersebut, yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba adalah permasalahan kualitas sumber daya manusia belum mampu berdaya saing, khususnya yang terkait dengan masih



rendahnya kualitas keluarga yaitu masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berkaitan dengan upaya peningkatan keluarga sejahtera dan masalah tertib administrasi kependudukan dan kepadatan penduduk. Upaya peningkatan keluarga sejahtera disini terkait dengan indikator penerapan 8 fungsi keluarga dalam rumah tangga, yakni fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan fungsi lingkungan, yang merupakan salah satu terjemahan dari program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Permasalahan lainnya yaitu belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB khususnya permasalahan upaya peningkatan kualitas kesehatan, yaitu yang terkait dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui program KB dan upaya peningkatan kesehatan reproduksi.

Khususnya pada permasalahan pengendalian penduduk, banyak muncul beragam permasalahan dan membutuhkan penanganan serius. Hal ini akan menjadikan semakin berat bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, yaitu :

- a. Tingginya Total Fertility Rate dalam rangka pengendalian kelahiran;



- b. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana);
- c. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan KB.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kabupaten Toba memiliki Visi ***“Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar”*** dengan 7 Misi yang mendukung penjabaran Visi tersebut, yaitu :

- Misi 1 : Infrastruktur yang Bagus dan Merata
- Misi 2 : **Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal**
- Misi 3 : Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera
- Misi 4 : Kesehatan yang Prima dan Terjangkau
- Misi 5 : Pariwisata Berkat dan Meriah
- Misi 6 : Membangun Iman yang terpelihara
- Misi 7 : Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Dari ke-7 Misi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mendukung capaian pada Misi 2 “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal” yang dikelompokkan berdasarkan tujuan dan sasaran, yaitu:

- Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Keluarga**
- Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk
 - Strategi Pengendalian penduduk
 - Strategi Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga ke-2



Melalui beberapa program, kegiatan dan penerapan peraturan, kegiatan advokasi, pergerakan, penyuluhan dan pendayagunaan tenaga Lini Lapangan diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan potensi Kabupaten Toba untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga kualitas hidup penduduk meningkat.

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya pokok dalam meningkatkan keluarga berkualitas melalui pengendalian kelahiran, sekaligus sebagai bagian integral dalam pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan salah satu prioritas dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 yang terkait langsung dengan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Secara keseluruhan, tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan yang menjadi fokus dalam permasalahan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba dengan sasaran Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan sasaran Renstra propinsi Sumatera Utara, khususnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Toba



berdasarkan Renstra BKKBN

No	Sasaran Renstra BKKBN	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra BKKBN	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Terkendalnya angka kelahiran (jumlah kelahiran per 1.000 penduduk dalam satu periode tertentu)	Update ateri/KIE kurang	
			Inovasi dalam penyampaian KIE	Perhatian stake holder baik pemerintah maupun swasta, terdapat permasalahan remaja di daerah besar
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Penambahan jumlah Peserta KB Baru belum signifikan menyumbang kenaikan jumlah PA	Data PB domisili tidak tercatat dan dilaporkan secara rutin	Memiliki aplikasi pencatatan pelayanan kontrasepsi secara online
		Kesadaran suami/pria untuk ber-KB masih rendah (berimplikasi pada masih rendahnya jumlah peserta KB Pria). Kesadaran suami/pria untuk ber-KB ini diperlukan karena tidak semua istri/wanita cocok menggunakan alat/metode KB sehingga bisa dialihkan ke alat/metode KB pria	Tidak semua PB yang terlayani di Faskes KB berdomisili/tercatat sebagai penduduk Kota	Memiliki MOU dengan faskes KB, termaksud untuk pencatatan pelaporannya
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Tingginya angka unmetneed di Kab. Toba (11,80%)	Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pria dalam program KB	Memiliki kelompok KB untuk mendorong keterlibatan pria/suami dalam program KB
			Kecenderungan bagi PUS untuk ber-KB non modern karena kekhawatiran akan efek samping	Pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat non modern secara gratis
4	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19	Angka Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih lebih rendah dibandingkan dengan Non MKJP dimana untuk Non MKJP sehingga resiko terjadi DO juga lebih tinggi		Dukungan Pemerintah Kab. Toba dalam menggratiskan pelayanan KB bagi setiap penduduk ber-KTP Kab. Toba
				Penyediaan alat dan obat kontrasepsi progestin (gratis) lebih diutamakan pada MKJP
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga adalah Angka Pengukuran Ketahanan dan Kesejahteraan dalam delapan dimensi	baru pertama dilaksanakan oleh BKKBN	Kemampuan SDM BKKBN memadai
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Meningkatnya angka kelahiran remaja (Ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).	Revitalisasi kelompok remaja	Memiliki kelompok remaja yang berbasis sektor dan wilayah
			Masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan	



			pengembangan jejaring kerjasama)	
			Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran	

**Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Toba
berdasarkan Renstra DPPKB Provinsi Sumatera Utara**

No.	Sasaran Renstra DPPKB Prov. Sumut	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra DPPKB Prov. Sumut	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Masih tingginya angka dispensasi nikah (data kemenag) dan masih tingginya angka kelahiran remaja (ibu melahirkan dibawah usia 24 tahun).	Inovasi dalam penyampaian KIE	Memiliki kelompok P yang berbasis se dan wilayah
			Revitalisasi kelompok remaja	Perhatian stake h baik pemerintah ma swasta, ter permasalah remaja besar
			Revitalisasi kelompok remaja	
			Masih terdapat perbedaan konsep penanganan remaja antara stake holder terkait (perlu penguatan dan pengembangan jejaring kerjasama)	
			Penanganan remaja belum sepenuhnya melibatkan remaja sehingga seringkali kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran	
2	Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia	Peningkatan kualitas kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR dan BKL) dan UPPKS	Kesadaran masyarakat untuk berkegiatan dimasyarakat semakin berkurang, terutama untuk keluarga yang baik suami maupun istrinya bekerja diluar rumah	Memiliki kader dari ti RT - RW dan Kelurahan
			Hambatan dalam kaderisasi muda dan potensial	
			Jumlah tenaga pembina dan pendamping kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS tidak sesuai dengan jumlah sasaran	Memiliki tenaga fung Petugas Lapangan sebagai perpanjangan tangan pemb kegiatan di wilayah
			Update materi/KIE kurang	



			Inovasi dalam penyampaian KIE	
--	--	--	-------------------------------	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada dasarnya tidak mempunyai keterkaitan dan tidak dipengaruhi oleh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini disebabkan pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) lebih dipengaruhi oleh pola kehidupan social dan budaya yang menyangkut perilaku masyarakat, sehingga dalam hal ini diperlukan pemetaan tersendiri tentang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dokumen KLHS-RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026, memutuskan 7 isu strategis prioritas dari hasil partisipasi pemangku kepentingan penyusun KLHS-RPJMD yaitu, Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan , peningkatan infrastruktur daerah, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penyediaan Sumber Air Bersih, Sanitasi yang Layak dan Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan



daya tampung, dan Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Penanggulangan Bencana.

Permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Toba yang berhubungan isu strategis pembangunan nasional dalam RPJMN Nasional Tahun 2019-2024, isu strategis pembangunan provinsi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023, arah kebijakan RPJPD dan RTRW Kabupaten Toba, isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, isu strategis KLHS RPJMD dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan SDG's
2. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid 19.
3. Industri 4.0
4. Pencapaian KSPN Danau Toba
5. Inovasi dan daya saing.

Permasalahan yang menjadi isu strategis dari TPB pilar sosial yang belum tercapai di Kabupaten Toba yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba meliputi:

1. TPB 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia yaitu :
Angka Total Fertility Rate (TFR) masih di atas target nasional, banyak dipengaruhi pandangan masyarakat tentang banyak anak banyak rezeki dan anak laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan karena laki-laki penerus marga.



2. TPB 5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, yaitu:
- a. Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
 - b. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dari hasil analisa indikator kinerja pada 5 tahun sebelumnya dan analisa permasalahan pelayanan Perangkat Daerah serta tinjauan terhadap indikator kinerja BKKBN serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, diambil Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C .25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toba
Tahun 2021-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA				
				TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga		Indeks Ketahanan Keluarga	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00
			Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12,10	12,00	11,90	11,80	11,70
			Persentase Peserta KB Aktif	77,45	77,5	77,5	77,6	77,6
			Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,90	18,95	19,00	19,05	19,10
			Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25
			Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	88,46	92,30	96,15	100,00	100,00
			Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,10	29,05	29,00	28,95	28,90
			Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**

		Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00
		Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00
		Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00
		Persentase Kelompok PIK R/M	100	100	100	100	100
		Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24	24	24	24



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan bagaimana cara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba



kemudian dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan berikut ini :

**Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Toba**

VISI	TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR		
MISI	MISI KEDUA: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN ANDAL		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Pengendalian penduduk	Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat
			Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan
			Meningkatkan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan Kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBPK (Bangga Kencana)
			Meningkatkan cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi
		Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga	Meningkatkan Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
			Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)
			Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan melalui pembinaan Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana serta Pengelolaan Keuangan Keluarga
			Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 s/d 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

6.2 KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2021 s/d 2026 sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 - 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - a. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal.
 - 2) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga.
 - b. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
 - c. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:



- 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
 - b. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 - c. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
- 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - b. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
 - c. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - c. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d. Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
 - e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - f. Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak

- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB
 - b. Pembinaan Terpadu Kampung KB
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
 - 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - b. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
 - c. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)
 - d. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)



4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Adminstrasi Kepegawaian
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 4) Adminstrasi umum perangkat daerah
 - a. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Barang cetakan dan penggandan
 - f. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

d. Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

45

- 6) Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Mebel
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. 3. PENDANAAN

Untuk dapat melihat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif dapat dilihat pada Tabel TC. 27 berikut ini.





BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021 - 2026 :

Tabel TC. 28
Indikator Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Toba

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Ketahanan Keluarga	0,61	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,68
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	25,71	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	37,00
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,63	0,61	0,60	0,59	0,58	0,57	0,57
4	TFR (Total Fertility Rate)	3,61	3,59	3,58	3,57	3,56	3,55	3,55
5	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80,76	88,46	92,30	96,15	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Peserta KB Aktif	77,30	77,45	77,50	77,55	77,60	77,65	77,65
7	Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18,81	18,90	18,95	19,00	19,05	19,10	19,10
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12,30	12,10	12,00	11,90	11,80	11,70	11,70
9	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0,31	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,25
10	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29,67	29,10	29,05	29,00	28,95	28,90	28,90
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	52,6	54,00	55,00	56,00	57,00	58,00	58,00
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	49,1	53,00	55,00	57,00	59,00	61,00	61,00
13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	38,2	42,00	44,00	46,00	48,00	50,00	50,00



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TOBA 2021-2026**

14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	56,3	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	68,00
15	Persentase Kelompok PIK R/M	100	100	100	100	100	100	100
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24	24	24	24	24	24



BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan “Rencana Strateji Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026” dapat terselesaikan.

Rencana Stratejik (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026.

Renstra ini memuat informasi secara transparan tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba Tahun 2021 – 2026 yang merupakan target kinerja yang ingin dicapai, dengan mereview tujuan, sasaran, visi dan misi, capaian program dan kegiatan, serta capaian Pelayanan Perangkat Daerah lima tahun sebelumnya, dimana keberhasilan pencapaian target kinerja dan program kegiatan yang sudah disusun dalam Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.



Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan Renstra di tahun mendatang.

Balige, 2021

KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
KABUPATEN TOBA

HERBET SP. PASARIBU, S.Si, Apt., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602031997021002

Tabel TC.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Satuan Indikator	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					2016
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	-	-	%	-	35.50	36.00	35.09	35.08	35.07	35.50	30.69	32.80	31.50	30.33	100%
2	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	-	-	%	-	1.95	1.94	1.93	1.92	1.91	0.55	0.47	0.99	1.71	0.63	28%
3	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	%	-	3.70	3.60	3.50	3.40	3.20	3.75	4.10	4.09	4.09	3.61	101%
4	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	-	-	%	-	0.00	52.00	52.00	60.00	62.00	0.00	13.64	15.91	52.17	52.17	0%
5	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	%	-	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
6	Jumlah Kebijakan (peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	peraturan	-	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
7	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan Proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan Program Pembangunan	-	-	sektor	-	0.00	0.00	0.00	5.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
8	Jumlah kerja sama Penyelenggara pendidikan formal, non formal dan informasi yang melakukan pendidikan kependudukan	-	-	MOU	-	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	orang	-	5.60	4.50	4.00	3.80	3.50	5.50	4.30	4.10	3.67	3.67	98%
10	Ratio akseptor KB	-	-	%	-	0.00	12.48	13.20	14.10	15.15	0.00	11.25	9.07	10.83	9.52	0%
11	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	-	-	%	-	65.00	76.00	76.00	77.00	77.20	70.00	76.80	79.61	75.83	77.30	108%
12	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	-	%	-	90.00	85.00	80.00	75.00	70.00	60.00	2.20	2.45	0.49	0.34	67%
13	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	-	%	-	3.50	3.40	3.30	3.20	3.10	3.50	0.50	0.60	0.02	0.02	100%
14	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	-	-	%	-	16.30	15.30	14.30	13.30	12.30	16.30	12.52	11.28	12.79	11.80	100%
15	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKPJ)	-	-	%	-	1.60	1.70	1.71	1.72	1.73	1.60	41.98	43.34	48.69	43.38	100%
16	Persentase tingkat kebelangsaan pemakaian Kontrasepsi	-	-	%	-	20.00	30.00	30.00	33.00	35.00	25.00	29.32	31.22	31.86	29.36	125%
17	Cakupan Anggota Bina keluarga Balita (BKB) ber - KB	-	-	%	-	61.00	61.00	63.00	64.00	65.00	17.00	41.00	41.00	56.55	67.90	28%
18	Cakupan Anggota Bina keluarga Remaja (BKR) ber - KB	-	-	%	-	52.00	52.00	54.00	56.00	58.00	19.10	0.32	0.32	51.31	64.13	37%
19	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	-	-	%	-	43.00	43.00	45.00	47.00	49.00	16.23	0.20	0.20	38.20	70.00	38%
20	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	-	-	%	-	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	0.00	0.01	0.01	6.25	0.00	0%
21	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan konseling Remaja /Mahasiswa	-	-	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	0.21	0.28	75.00	39.00	40%
22	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	-	-	%	-	0.00	23.00	23.00	30.00	31.00	0.00	23.00	28.57	55.17	57.14	0%

23	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	-	%	-	56.00	56.00	57.00	58.00	59.00	2.37	0.70	0.70	62.98	78.32	4%
24	Ratio petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	-	-	%	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%
25	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	-	%	-	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	35.00	45.00	70.85	99.94	75.10	117%
26	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	-	%	-	75.00	75.00	77.00	80.00	85.00	70.37	91.30	91.30	92.59	100.00	94%
27	Cakupan penyediaan informasi data Mikro keluarga di setiap Desa	-	-	%	-	65.00	70.00	70.00	75.00	80.00	65.00	53.00	61.48	78.69	81.97	100%
28	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	-	-	%	-	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0%
29	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	-	%	-	15.00	25.00	50.00	60.00	70.00	18.00	35.00	42.00	41.65	71.27	120%
30	Cakupan Keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	-	%	-	15.00	25.00	45.00	50.00	55.00	20.00	40.00	41.00	45.02	74.66	133%
31	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	tahun	-	20.00	20.00	21.00	23.00	24.00	23.50	26.00	25.80	23.00	25.00	118%
32	Persentase pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	-	%	-	0.80	0.81	1.00	3.00	4.00	0.78	0.40	0.40	0.40	0.40	98%
33	Indeks Pembinaan Keluarga Berencana	-	-	%	-	64.51	64.00	64.95	64.96	65.00	64.51	64.57	52.34	55.32	52.34	100%

Rasio Capaian pada Tahun			
2017	2018	2019	2020
18	19	20	21
85%	93%	90%	86%
24%	51%	89%	33%
114%	117%	120%	113%
26%	31%	87%	84%
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
0%	0%	0%	0%
96%	103%	97%	105%
90%	69%	77%	63%
101%	105%	98%	100%
3%	3%	1%	0%
15%	18%	1%	1%
82%	79%	96%	96%
2469%	2535%	2831%	2508%
98%	104%	97%	84%
67%	65%	88%	104%
1%	1%	92%	111%
0%	0%	81%	143%
0%	0%	25%	0%
0%	0%	75%	39%
100%	124%	184%	184%

1%	1%	109%	133%
100%	100%	100%	100%
129%	177%	222%	150%
122%	119%	116%	118%
76%	88%	105%	102%
0%	0%	0%	0%
140%	84%	69%	102%
160%	91%	90%	136%
130%	123%	100%	104%
49%	40%	13%	10%
101%	81%	85%	81%

Tabel TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Toba

Urusan/bidang urusan/Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio ant Angga	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Belanja Daerah	9,445,128,700	7,772,030,400	10,631,071,000	12,708,106,900	10,533,287,000	8,402,731,648	6,011,082,875	8,426,586,664	11,818,166,819	9,671,293,908	88.96%	77.34%
- Belanja Tidak Langsung	3,848,488,000	3,031,987,200	2,410,595,800	2,143,178,200	1,981,460,000	3,684,838,212	2,539,791,091	1,936,322,531	1,876,316,046	1,946,149,329	95.75%	83.77%
- Belanja Pegawai	3,848,488,000	3,031,987,200	2,410,595,800	2,143,178,200	1,981,460,000	3,684,838,212	2,539,791,091	1,936,322,531	1,876,316,046	1,946,149,329	95.75%	83.77%
Belanja Langsung	5,596,640,700	4,740,043,200	8,220,475,200	10,564,928,700	8,551,827,000	4,717,893,436	3,471,291,784	6,490,264,133	9,941,850,773	7,725,144,579	84.30%	73.23%
- Belanja Pegawai	16,000,000	15,000,000	186,625,000	2,150,078,200	1,981,460,000	13,670,000	14,910,000	172,975,000	1,871,896,942	1,946,149,329	85.44%	99.40%
- Belanja Barang dan Jasa	3,878,045,100	3,696,035,900	6,997,995,200	7,592,330,700	6,321,327,000	3,248,751,078	3,193,581,784	5,905,999,133	7,271,660,850	5,561,994,450	83.77%	86.41%
- Belanja Modal	1,702,595,600	1,029,007,300	1,035,855,000	822,519,800	249,040,000	1,455,472,358	262,800,000	411,290,000	798,292,981	217,000,800	85.49%	25.54%

Tahun Realisasi dan Tahun ke-			Rata Rata Pertumbuhan	
2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
15	16	17	18	19
79.26%	93.00%	91.82%	2.20%	2.85%
80.33%	87.55%	98.22%	-12.43%	-11.99%
80.33%	87.55%	98.22%	-12.43%	-11.99%
78.95%	94.10%	90.33%	8.85%	10.37%
92.69%	87.06%	98.22%	162.16%	169.58%
84.40%	95.78%	87.99%	10.27%	11.35%
39.71%	97.05%	87.13%	-31.92%	-31.66%

Tabel T.C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TAR	
				TUJUAN / SAS	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga		Indeks Ketahanan Keluarga	0.64	0.65
		Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	29.00	31.00
			Tingkat Penurunan TFR (Total Fertility Rate)	3.59	3.58
			Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.61	0,60
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12.10	12.00
			Persentase Peserta KB Aktif	77.45	77.50
			Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18.90	18.95
			Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0.29	0.28
			Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	88.46	92.30
			Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29.10	29.05
			Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	54.00	55.00
			Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	53.00	55.00
			Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	42.00	44.00
			Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	60.00	62.00
			Persentase Kelompok PIK R/M	100	100
			Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24

BUDGET KINERJA		
PERNYATAAN PADA TAHUN KE-		
2024	2025	2026
7	8	9
0.66	0.67	0.68
33.00	35.00	37.00
3.57	3.56	3.55
0.59	0.58	0.57
11.90	11.80	11.70
77.55	77.60	77.65
19.00	19.05	19.10
0.27	0.26	0.25
96.15	100.00	100.00
29.00	28.95	28.90
56.00	57.00	58.00
57.00	59.00	61.00
46.00	48.00	50.00
64.00	66.00	68.00
100	100	100
24	24	24

TABEL T.C. 26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAI

VISI	TOBA UNGGUL DAN BERSINAR	
MISI	MISI KEDUA: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UI	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk	Pengendalian penduduk
		Peningkatan keluarga berencana dan pembangunan ketahanan keluarga

--	--	--

KAN

NGGUL DAN ANDAL
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan edukasi pengendalian penduduk bagi aparatur, remaja dan masyarakat
Meningkatkan peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan
Meningkatkan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan Kader PPKBD/Sub PPKBD dalam penyuluhan Program KKBP (Bangga Kencana)
Meningkatkan cakupan dan kualitas advokasi KIE, jejaring kemitraan, kinerja petugas lini lapangan dan pengelolaan smart data dan informasi melalui teknologi
Meningkatkan Kesertaan Keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan keluarga berencana (KB)

Meningkatkan pendewasaan usia perkawinan melalui pembinaan Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana serta Pengelolaan Keuangan Keluarga

Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS

Tabel T.C 27
Rencana Program, dan Pdanaan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk			Indeks Ketahanan Keluarga	%	0.61	0.64		0.65		0.66		0.67		0.68		0.68
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3.61	3.59	335,000,000	3.58	194,250,000	3.57	203,962,500	3.56	214,160,625	3.55	224,868,656	2
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0	25	195,000,000	26	47,250,000	27	49,612,500	28	52,093,125	29	54,697,781	29
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 pilar yang tersusun	Dokumen	0	1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	0	3	45,000,000	3	47,250,000	3	49,612,500	3	52,093,125	3	54,697,781	3
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	persen	100	100	140,000,000	100	147,000,000	100	154,350,000	100	162,067,500	100	170,170,875	100
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya data pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Buku	0	1	75,000,000	1	78,750,000	1	82,687,500	1	86,821,875	1	91,162,969	1
		2.14.02.2.02.14	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Dokumen	0	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	1	24,310,125	1
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	persen	0	30	45,000,000	31	47,250,000	32	49,612,500	33	52,093,125	35	54,697,781	35
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	persen	12.30	12.10	1,938,834,500	11.90	2,479,750,000	11.80	3,372,287,500	11.70	3,750,151,875	11.70	3,952,281,969	100
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need	persen	n/a	60 (16 Kec & 146 \Desa/Kel)	75,000,000	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	382,500,000	80 (16 Kec & 195 Desa/Kel)	470,750,000	90 (16 Kec & 219 Desa/Kel)	517,825,000	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)	569,607,500	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kecamatan	n/a	0	0	0	0	16	50,000,000	16	55,000,000	16	60,500,000	16
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	Kecamatan	0	16	75,000,000	16	82,500,000	16	90,750,000	16	99,825,000	16	109,807,500	16
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	0	0	0	16	300,000,000	16	330,000,000	16	363,000,000	16	399,300,000	16
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	57.14	60	735,000,000	61	808,500,000	62	1,189,350,000	63	1,308,285,000	65	1,439,113,500	65
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	Jenis	n/a	0	0	0	0	2	300,000,000	3	330,000,000	5	363,000,000	5
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesetaraan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	persen	n/a	65	500,000,000	70	550,000,000	75	605,000,000	80	665,500,000	90	732,050,000	90
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ratio petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	persen	100	100	235,000,000	100	258,500,000	100	284,350,000	100	312,785,000	100	344,063,500	100
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	50	60	383,834,500	70	507,000,000	75	841,675,000	80	1,007,636,250	85	978,505,813	85
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Pemenuhan Ketersediaan Alokan di Faskes	persen	75	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000	100	57,881,250	100	60,775,313	100
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	persen	76	76	144,000,000	77	150,000,000	78	156,000,000	79	162,000,000	80	168,000,000	80
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB	jenis	n/a	0	0	0	0	8	400,000,000	8	440,000,000	8	484,000,000	8

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	77.30	77.45	30,000,000	77.50	33,000,000	77.55	36,300,000	77.60	39,930,000	77.65	43,923,000	77.65
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok	Jumlah PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi	orang	n/a	1600	75,000,000	1600	82,500,000	1600	90,750,000	1600	99,825,000	1600	109,807,500	1600
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	0	0	0	25	90,000,000	0	0	25	100,000,000	0	0	25
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	Gerak	0	4 frek/thn/kec	84,834,500	4 frek/thn/kec	99,000,000	4 frek/thn/kec	103,500,000	4 frek/thn/kec	108,000,000	4 frek/thn/kec	112,000,000	4 frek/thn/kec
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah MoU/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB	MoU/PKS	n/a	5	245,000,000	5	255,000,000	7	265,500,000	9	276,525,000	10	288,101,250	10
		2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK- KB-Kes, IBI-KB-Kes, TN-KB-Kes)	Jumlah mitra aktif	n/a	6	200,000,000	8	210,000,000	10	220,500,000	12	231,525,000	14	243,101,250	14
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	persen	52.17	55	45,000,000	57	45,000,000	58	45,000,000	59	45,000,000	60	45,000,000	60
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	29.67	29.1	500,000,000	29.05	526,750,000	29	555,012,500	28.95	584,880,625	28.9	616,453,906	28.9
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	8.43	13	500,000,000	15	526,750,000	17	555,012,500	19	584,880,625	21	616,453,906	21
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	jenis	n/a	4	35,000,000	5	38,500,000	5	42,350,000	5	46,585,000	5	51,243,500	5
		2.14.04.2.01.04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	orang	150	384	100,000,000	384	105,000,000	384	110,250,000	384	115,762,500	384	121,550,625	384
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	kelompok	n/a	640	115,000,000	640	120,750,000	640	126,787,500	640	133,126,875	640	139,783,219	640
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).	kelompok	n/a	PIK R = 25; BKR = 80	250,000,000	PIK R = 30; BKR = 85;	262,500,000	PIK R = 35; BKR = 90	275,625,000	PIK R = 40; BKR = 95	289,406,250	PIK R = 30; BKR = 100	303,876,563	PIK R = 30; BKR = 100
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Persen	56.3	60	86,000,000	62	88,000,000	63	90,000,000	66	92,000,000	68	94,000,000	68
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	kelompok	18	18	86,000,000	20	88,000,000	23	90,000,000	24	92,000,000	25	94,000,000	35
		2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100%	100%	2,955,094,730	100%	3,535,802,055	100%	3,731,802,157	100%	3,585,798,263	100%	3,858,197,276	100%
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	85	87	43,500,000	8	45,675,000	89	47,958,750	90	50,356,688	95	52,874,522	95
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	30,000,000	7	31,500,000	7	33,075,000	7	34,728,750	7	36,465,188	7
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Dokumen	10	10	13,500,000	10	14,175,000	10	14,883,750	10	15,627,938	10	16,409,334	10
		2.14.01.2.02	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	2,290,000,000	100	2,404,500,000	100	2,524,725,000	100	2,650,961,250	100	2,783,509,313	100
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	25	2,285,000,000	32	2,399,250,000	33	2,519,212,500	34	2,645,173,125	35	2,777,431,781	36
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan	10	10	5,000,000	10	5,250,000	10	5,512,500	10	5,788,125	10	6,077,531	10
		2.14.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%	79.07	83.72	-	88.37	30,000,000	93.02	50,000,000	93.02	55,000,000	97.67	95,000,000	97.67
		2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	stel	0	0	-	0	-	0	-	0	-	35	35,000,000	35

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	orang	0	0	0	3	30,000,000	3	50,000,000	3	55,000,000	3	60,500,000	3
		2.14.01.2.06	Adminstrasi umum perangkat daerah	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	Bulan	12	12	327,134,730	12	343,491,467	12	360,666,040	12	378,699,342	12	397,634,309	12
		2.14.01.2.06.01	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor per tahun	jenis	7	20	2,980,000	22	3,129,000	24	3,285,450	26	3,449,723	28	3,622,209	30
		2.14.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	50	60	79,500,000	60	83,475,000	60	87,648,750	60	92,031,188	60	96,632,747	60
		2.14.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Jenis	10	10	20,319,200	10	21,335,160	10	22,401,918	10	23,522,014	10	24,698,115	10
		2.14.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk Rapat Koordinasi Bulanan	kotak	0	540	27,000,000	600	28,350,000	660	29,767,500	720	31,255,875	756	32,818,669	756
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	jenis	10	10	47,335,530	15	49,702,307	17	52,187,422	20	54,796,793	25	57,536,633	25
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	1	3	10,000,000	3	10,500,000	3	11,025,000	3	11,576,250	3	12,155,063	3
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	orang/bulan	120	120	140,000,000	130	147,000,000	135	154,350,000	140	162,067,500	150	170,170,875	150
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	0	0	0	12	350,000,000	12	367,500,000	12	50,000,000	12	107,000,000	12
		2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Unit	0	0	0	1	300,000,000	0	0	2	50,000,000	0	0	0
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	Jenis	0	0	0	3	50,000,000	0	0	0	0	3	65,000,000	3
		2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0	0	0	5	125,000,000	0	0	0	0	0
		2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	0	0	0	0	0	5	40,000,000	0	0	7	42,000,000	7
		2.14.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	bulan	12	12	170,860,000	12	193,602,988	12	203,993,137	12	214,973,793	12	226,581,582	12
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	2	2	20,860,000	2	21,903,000	3	22,998,150	3	24,148,058	3	25,355,460	3
		2.14.01.2.08.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara per tahun	jenis	-	-	-	48	14,199,988	50	15,619,987	52	17,181,985	55	18,900,184	58
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	orang/bulan	17	17	150,000,000	18	157,500,000	19	165,375,000	20	173,643,750	21	182,325,938	21
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	123,600,000	100	168,532,600	100	176,959,230	100	185,807,192	100	195,097,551	100
		2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara per tahun	unit	50	50	123,600,000	52	129,780,000	53	136,269,000	54	143,082,450	55	150,236,573	55
		2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	jenis	0	0	-	2	10,445,600	2	10,967,880	3	11,516,274	3	12,092,088	3
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor terpelihara	jenis	0	0	-	10	15,673,000	10	16,456,650	10	17,279,483	10	18,143,457	10
		2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	0	0	-	2	12,634,000	2	13,265,700	2	13,928,985	2	14,625,434	2
			JUMLAH					###		6,736,552,055		7,863,064,657		8,134,991,388		8,651,801,807	

Balige,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PE
KABUP

HERBET SP. PAS/
NIP. 19660.

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	Saldo pada akhir periode Perangkat Daerah	
		Rp	
		18	19
	Kab. Toba		20
	DPPKB	133,705,688	Kab. Toba
	DPPKB	54,697,781	Kab. Toba
	DPPKB	0	Kab. Toba
	DPPKB	54,697,781	Kab. Toba
	DPPKB	79,007,906	Kab. Toba
	DPPKB	91,162,969	Kab. Toba
	DPPKB	24,310,125	Kab. Toba
	DPPKB	54,697,781	Kab. Toba
	DPPKB	4,052,281,969	Kab. Toba
	DPPKB	569,607,500	Kab. Toba
	DPPKB	60,500,000	Kab. Toba
	DPPKB	109,807,500	Kab. Toba
	DPPKB	399,300,000	Kab. Toba
	DPPKB	1,439,113,500	Kab. Toba
	DPPKB	363,000,000	Kab. Toba
	DPPKB	732,050,000	Kab. Toba
	DPPKB	344,063,500	Kab. Toba
	DPPKB	1,078,505,813	Kab. Toba
	DPPKB	60,775,313	Kab. Toba
	DPPKB	168,000,000	Kab. Toba
	DPPKB	484,000,000	Kab. Toba

ja pada akhir periode Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
Rp		
43,923,000	DPPKB	Kab. Toba
109,807,500	DPPKB	Kab. Toba
100,000,000	DPPKB	Kab. Toba
112,000,000	DPPKB	Kab. Toba
288,101,250	DPPKB	Kab. Toba
243,101,250	DPPKB	Kab. Toba
45,000,000	DPPKB	Kab. Toba
616,453,906	DPPKB	Kab. Toba
616,453,906	DPPKB	Kab. Toba
51,243,500	DPPKB	Kab. Toba
121,550,625	DPPKB	Kab. Toba
139,783,219	DPPKB	Kab. Toba
303,876,563	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
4,010,201,853	DPPKB	Kab. Toba
53,694,989	DPPKB	Kab. Toba
36,465,188	DPPKB	Kab. Toba
17,229,801	DPPKB	Kab. Toba
2,922,684,778	DPPKB	Kab. Toba
2,916,303,370	DPPKB	Kab. Toba
6,381,408	DPPKB	Kab. Toba
95,500,000	DPPKB	Kab. Toba
35,000,000	DPPKB	Kab. Toba

META DATA

NO	INDIKATOR	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Seti		
			2020	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Ketahanan Keluarga	$IKK = ((\text{Partisipasi KB Aktif} / \text{Jumlah PUS} \times 40\%) + (\text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKB} / \text{Jumlah Keluarga Sasaran BKB} \times 10\%) + \text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKR} / \text{Jumlah Keluarga Sasaran BKR} \times 10\%) + (\text{Jumlah Keluarga yang masuk Kelompok BKL} / \text{Jumlah Keluarga Sasaran BKL} \times 10\%) + (\text{Jumlah Sekolah SLTP yang mendapat Pendidikan Kependudukan} / \text{Jumlah SLTP} \times 30\%)$	0.61	0.64	0.65	0.66
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	$\text{Persentase Peran Serta Masyarakat} = \text{Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK} / \text{Jumlah Penduduk} \times 100\%$	25.71	29.00	31.00	33.00
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$LPP = ((\text{Jumlah penduduk pada tahun ke } t / \text{Jumlah penduduk pada tahun dasar}) \times (1/t - 1)) \times 100\%$	0.63	0.61	0.60	0.59
4	TFR (Total Fertility Rate)	$\text{Angka Kelahiran Total (TFR)} = 5 \times (\text{ASFR1} + \text{ASFR2} + \text{ASFR3} + \text{ASFR4} + \text{ASFR5} - \text{ASFR6} + \text{ASFR7})$	3.61	3.59	3.58	3.57
5	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	$\text{Persentase Faskes} = \text{Jumlah Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS} / \text{Jumlah Faskes dan Jejaring} \times 100\%$	80.76	88.46	92.30	96.15
6	Persentase Peserta KB Aktif	$\text{Persentase Peserta KB Aktif} = \text{Peserta KB Aktif (CU)} / \text{PUS} \times 100\%$	77.30	77.45	77.50	77.55
7	Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	$\text{Persentase Kontap} = \text{Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Mantap} / \text{Jumlah Peserta KB aktif} \times 100\%$	18.81	18.90	18.95	19.00
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	$\text{Unmetneed} = \text{Jumlah PUS yang Ingin Anak Ditunda} + \text{PUS Tidak Ingin Anak lagi} / \text{PUS} \times 100\%$	12.3	12.10	12.00	11.90
9	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	$\text{ASFR} = \text{Jumlah Kelahiran pada Kelompok Tertentu} / \text{Jumlah Perempuan pada Kelompok Tertentu} \times 100$	0.31	0.29	0.28	0.27
10	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	$\text{Pra S dan KSI} = (\text{Jumlah Pra S} + \text{KSI}) / \text{Jumlah Keluarga} \times 100\%$	29.67	29.10	29.05	29.00
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	$\text{Persentase BKB berKB} = \text{Jumlah anggota BKB yang Ber-KB} / \text{Jumlah anggota Kelompok BKB} \times 100\%$	52.6	54.00	55.00	56.00
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	$\text{Persentase BKR berKB} = \text{Jumlah anggota BKR yang Ber-KB} / \text{Jumlah anggota Kelompok BKR} \times 100\%$	49.1	53.00	55.00	57.00

13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	Persentase BKL berKB= Jumlah anggota BKL yang Ber-KB/Jumlah anggota Kelompok BKL*100%	38.2	42.00	44.00	46.00
14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Persentase UPPKS berKB= Jumlah anggota UPPKS yang Ber-KB Mandiri/Jumlah anggota Kelompok UPPKS*100%	56.3	60.00	62.00	64.00
15	Persentase Kelompok PIK R/M	Persentase PIK R/M= Jumlah PIK RM/ Jumlah Desa/Kel*100%	50	55	56	57
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	Rata-rata Usia Kawin Pertama= Jumlah (umur kawin pertama wanita*jumlah wanita menurut usia kawin pertama)/Jumlah wanita menurut usia kawin pertama	24	24	24	24

lap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2025	2026	
8	9	10
0.67	0.68	0.68
35.00	37.00	37.00
0.58	0.57	0.57
3.56	3.55	3.55
100.00	100.00	100.00
77.60	77.65	77.65
19.05	19.10	19.10
11.80	11.70	11.70
0.26	0.25	0.25
28.95	28.90	28.90
57.00	58.00	58.00
59.00	61.00	61.00

48.00	50.00	50.00
66.00	68.00	68.00
58	60	60
24	24	24

Tabel T.C 27
Rencana Program, , dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja periode Ren: Da
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk			Indeks Ketahanan Keluarga	%	0.61	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.67	0.68	0.68	0.68	0.68	
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3.61	3.59	370,000,000	3.58	231,000,000	3.57	242,550,000	3.56	254,677,500	3.55	267,411,375	3.55
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	-	25.00	195,000,000	26.00	47,250,000	27.00	49,612,500	28.00	52,093,125	29.00	54,697,781	29.00
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen GDPK 5 pilar yang tersusun	Dokumen	-	1.00	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	-	3.00	45,000,000	3.00	47,250,000	3.00	49,612,500	3.00	52,093,125	3.00	54,697,781	3.00
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	persen	100.00	100.00	175,000,000	100.00	183,750,000	100.00	192,937,500	100.00	202,584,375	100.00	212,713,594	100.00
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Data pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Buku	-	1.00	80,000,000	1.00	84,000,000	1.00	88,200,000	1.00	92,610,000	1.00	97,240,500	1.00
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Dokumen	-	1.00	50,000,000	1.00	52,500,000	1.00	55,125,000	1.00	57,881,250	1.00	60,775,313	1.00
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	persen	-	30.00	45,000,000	31.00	47,250,000	32.00	49,612,500	33.00	52,093,125	35.00	54,697,781	35.00
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (unmeet need)	persen	12.30	12.10	2,681,404,598	11.90	2,335,000,000	11.80	2,388,900,000	11.70	2,682,730,000	11.70	3,008,710,245	100.00
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penyebaran materi KIE Program Bangsa Kencana dalam rangka penurunan unmet need	persen	n/a	60 (16 Kec & 146 \ Desa/Kel)	307,404,598	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	258,000,000	80 (16 Kec & 195 Desa/Kel)	270,900,000	90 (16 Kec & 219 Desa/Kel)	297,990,000	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)	495,264,000	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	Kecamatan	n/a	16.00	80,000,000	16.00	88,000,000	16.00	92,400,000	16.00	101,640,000	16.00	141,804,000	16.00
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangsa Kencana	Kecamatan	-	16.00	227,404,598	16.00	120,000,000	16.00	126,000,000	16.00	138,600,000	16.00	153,460,000	16.00
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KBPK	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	-	-	-	16.00	50,000,000	16.00	52,500,000	16.00	57,750,000	16.00	200,000,000	16.00
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	57.14	60.00	865,000,000	61.00	520,000,000	62.00	696,000,000	63.00	765,600,000	65.00	842,160,000	65.00
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	Jenis	n/a	1.00	80,000,000	-	-	2.00	150,000,000	3.00	165,000,000	5.00	181,500,000	5.00
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	persen	n/a	65.00	500,000,000	70.00	230,000,000	75.00	241,500,000	80.00	265,650,000	90.00	292,215,000	90.00
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ratio petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /kelurahan	persen	100.00	100.00	285,000,000	100.00	290,000,000	100.00	304,500,000	100.00	334,950,000	100.00	368,445,000	100\
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	50.00	60.00	1,025,000,000	70.00	1,255,000,000	75.00	1,150,100,000	80.00	1,279,300,000	85.00	1,349,482,245	85.00
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	persen	75.00	100.00	75,000,000	100.00	82,500,000	100.00	83,000,000	100.00	150,000,000	100.00	157,500,000	100.00
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).	persen	76.00	76.00	450,000,000	77.00	455,000,000	78.00	455,500,000	79.00	340,000,000	80.00	377,852,245	80.00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja periode Ren: Da
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB	jenis	n/a	-	-	-	-	8.00	200,000,000	8.00	220,000,000	8.00	300,000,000	8.00
		2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	77.30	77.45	75,000,000	77.50	82,500,000	77.55	83,000,000	77.60	91,300,000	77.65	100,430,000	77.65
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok	PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi (Kumulatif)	orang	n/a	1.000	100,000,000	1.200	105,000,000	1.300	105,600,000	1.400	200,000,000	1.500	220,000,000	1.500
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	orang	-	-	-	20.00	200,000,000	-	-	15.00	128,000,000	-	-	15.00
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak	Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	Gerak	-	4 frek/thn/kec	325,000,000	4 frek/thn/kec	330,000,000	4 frek/thn/kec	223,000,000	4 frek/thn/kec	150,000,000	4 frek/thn/kec	193,700,000	4 frek/thn/kec
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB	Mou/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB	MoU/PKS	n/a	5.00	484,000,000	5.00	302,000,000	7.00	271,900,000	9.00	238,200,000	10.00	180,000,000	10.00
		2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK- KB-Kes, IBI-KB-Kes, TN-KB-Kes)	mitra aktif	n/a	6.00	334,000,000	8.00	137,000,000	10.00	184,000,000	12.00	193,200,000	14.00	135,000,000	14.00
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	persen	52.17	55.00	150,000,000	57.00	165,000,000	58.00	87,900,000	59.00	45,000,000	60.00	45,000,000	60.00
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	29.67	29.10	850,000,000	29.05	780,000,000	29.00	656,500,000	28.95	694,087,482	28.90	714,755,000	28.90
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	8.43	13.00	700,000,000	15.00	615,000,000	17.00	566,500,000	19.00	602,087,482	21.00	620,755,000	21.00
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Sarana dan Prasarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	jenis	n/a	5.00	200,000,000	4.00	65,000,000	4.00	65,500,000	4.00	72,050,000	4.00	79,255,000	4.00
		2.14.04.2.01.04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	kader	150.00	384.00	200,000,000	384.00	220,000,000	384.00	185,000,000	384.00	180,037,482	384.00	182,000,000	384.00
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Kelompok BKB dan BKL) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	orang	n/a	640.00	150,000,000	640.00	165,000,000	640.00	166,000,000	640.00	170,000,000	640.00	178,500,000	640.00
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).	kelompok	n/a	PIK R = 25; BKR =80	150,000,000	PIK R = 30; BKR =85;	165,000,000	PIK R = 35; BKR =90	150,000,000	PIK R = 40; BKR =95	180,000,000	PIK R = 30; BKR =100	181,000,000	PIK R = 30; BKR =100
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Persen	56.30	60.00	150,000,000	62.00	165,000,000	63.00	90,000,000	66.00	92,000,000	68.00	94,000,000	68.00
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	kelompok	18.00	18.00	150,000,000	20.00	165,000,000	23.00	90,000,000	24.00	92,000,000	25.00	94,000,000	35.00
		2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSEN	100.00	100.00	2,955,623,447	100.00	3,621,410,909	100.00	3,802,469,153	100.00	3,579,400,863	100.00	3,851,044,492	100.00
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	85.00	87.00	43,500,000	8.00	45,675,000	89.00	47,958,750	90.00	50,356,688	95.00	52,874,522	95.00
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7.00	7.00	30,000,000	7.00	31,500,000	7.00	33,075,000	7.00	34,728,750	7.00	36,465,188	7.00
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Dokumen	10.00	10.00	13,500,000	10.00	14,175,000	10.00	14,883,750	10.00	15,627,938	10.00	16,409,334	10.00
		2.14.01.2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	%	100.00	100.00	2,290,000,000	100.00	2,404,500,000	100.00	2,548,958,580	100.00	2,676,406,509	100.00	2,810,226,834	100.00
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25.00	25.00	2,285,000,000	32.00	2,399,250,000	33.00	2,543,446,080	34.00	2,670,618,384	35.00	2,804,149,303	35.00

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi kinerja periode Ren: Da
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan akhir tahun	laporan	10.00	10.00	5,000,000	10.00	5,250,000	10.00	5,512,500	10.00	5,788,125	10.00	6,077,531	10.00
		2.14.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%	79.07	83.72	-	88.37	143,079,600	93.02	126,000,000	93.02	55,000,000	97.67	95,500,000	97.67
		2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	-	-	-	25.00	23,079,600	-	-	-	-	35.00	35,000,000	35.00
		2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	orang	-	-	-	7.00	120,000,000	8.00	126,000,000	3.00	55,000,000	3.00	60,500,000	3.00
		2.14.01.2.06	Adminstrasi umum perangkat daerah	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	Bulan	12.00	12.00	282,134,730	12.00	326,191,455	12.00	342,501,027	12.00	358,082,833	12.00	378,448,897	12.00
		2.14.01.2.06.01	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor per tahun	jenis	7.00	20.00	2,980,000	22.00	3,129,000	24.00	3,285,450	26.00	3,449,723	28.00	3,622,209	30.00
		2.14.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan ATK	Jenis	50.00	60.00	79,500,000	60.00	83,475,000	60.00	87,648,750	60.00	92,031,188	60.00	96,632,747	60.00
		2.14.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	10.00	10.00	20,319,200	10.00	21,335,160	10.00	22,401,918	10.00	23,522,014	10.00	24,698,115	10.00
		2.14.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	makanan dan minuman yang tersedia untuk Rapat Koordinasi Bulanan	kotak	-	540.00	27,000,000	600.00	28,350,000	660.00	29,767,500	720.00	31,255,875	756.00	32,818,669	756.00
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	jenis	10.00	10.00	7,335,530	15.00	7,702,307	17.00	8,087,422	20.00	8,491,793	25.00	8,916,383	25.00
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	1.00	3.00	5,000,000	3.00	5,250,000	3.00	5,512,500	3.00	5,788,125	3.00	6,077,531	3.00
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	orang/bulan	120.00	120.00	140,000,000	130.00	176,949,988	135.00	185,797,487	140.00	193,544,116	150.00	205,683,245	150.00
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	-	-	-	12.00	350,000,000	12.00	367,500,000	12.00	51,526,499	12.00	107,000,000	12.00
		2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Unit	-	-	-	1.00	300,000,000	-	-	2.00	51,526,499	-	-	-
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	Jenis	-	-	-	3.00	50,000,000	-	-	-	-	3.00	65,000,000	3.00
		2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	5.00	125,000,000	-	-	-	-	-
		2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	-	-	-	-	-	5.00	40,000,000	-	-	7.00	42,000,000	7.00
		2.14.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	bulan	12.00	12.00	171,388,717	12.00	175,011,855	12.00	183,750,146	12.00	192,937,653	12.00	202,584,536	12.00
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Internet	Jenis	2.00	2.00	21,388,717	2.00	23,011,855	3.00	24,150,146	3.00	25,357,653	3.00	26,625,536	3.00
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tenaga Kontrak/Honorar dan Pengelola Keuangan	orang/bulan	17.00	17.00	150,000,000	18.00	152,000,000	19.00	159,600,000	20.00	167,580,000	21.00	175,959,000	21.00
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100.00	100.00	168,600,000	100.00	176,953,000	100.00	185,800,650	100.00	195,090,683	100.00	204,409,703	100.00
		2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/operasional yang terpelihara per tahun	unit	50.00	50.00	153,600,000	52.00	161,280,000	53.00	169,344,000	54.00	177,811,200	55.00	186,266,246	55.00
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin kantor terpelihara	jenis	-	10.00	15,000,000	10.00	15,673,000	10.00	16,456,650	10.00	17,279,483	10.00	18,143,457	10.00
								6,857,028,045		6,967,410,909		7,090,419,153		7,210,895,845		7,841,921,112	

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
		18	20
Rp	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
1,365,638,875	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
-	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
212,713,594	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
97,240,500	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
60,775,313	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
13,096,744,843	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
495,264,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
141,804,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
153,460,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
200,000,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
842,160,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
181,500,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
292,215,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
368,445,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
1,395,782,245	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
157,500,000	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba
377,852,245	DPPKB	Kab. Toba	Kab. Toba

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab
		Rp
300,000,000	DPPKB	Kab. Toba
100,430,000	DPPKB	Kab. Toba
220,000,000	DPPKB	Kab. Toba
128,000,000	DPPKB	Kab. Toba
112,000,000	DPPKB	Kab. Toba
180,000,000	DPPKB	Kab. Toba
135,000,000	DPPKB	Kab. Toba
45,000,000	DPPKB	Kab. Toba
3,695,342,482	DPPKB	Kab. Toba
620,755,000	DPPKB	Kab. Toba
79,255,000	DPPKB	Kab. Toba
182,000,000	DPPKB	Kab. Toba
178,500,000	DPPKB	Kab. Toba
181,000,000	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
3,851,348,368	DPPKB	Kab. Toba
52,874,522	DPPKB	Kab. Toba
36,465,188	DPPKB	Kab. Toba
16,409,334	DPPKB	Kab. Toba
2,810,530,711	DPPKB	Kab. Toba
2,804,149,303	DPPKB	Kab. Toba

Kerja pada akhir stra Perangkat erah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
6,381,408	DPPKB	Kab. Toba
95,500,000	DPPKB	Kab. Toba
35,000,000	DPPKB	Kab. Toba
60,500,000	DPPKB	Kab. Toba
378,448,897	DPPKB	Kab. Toba
3,622,209	DPPKB	Kab. Toba
96,632,747	DPPKB	Kab. Toba
24,698,115	DPPKB	Kab. Toba
32,818,669	DPPKB	Kab. Toba
8,916,383	DPPKB	Kab. Toba
6,077,531	DPPKB	Kab. Toba
205,683,245	DPPKB	Kab. Toba
107,000,000	DPPKB	Kab. Toba
-	DPPKB	Kab. Toba
65,000,000	DPPKB	Kab. Toba
-	DPPKB	Kab. Toba
42,000,000	DPPKB	Kab. Toba
202,584,536	DPPKB	Kab. Toba
26,625,536	DPPKB	Kab. Toba
175,959,000	DPPKB	Kab. Toba
204,409,703	DPPKB	Kab. Toba
186,266,246	DPPKB	Kab. Toba
18,143,457	DPPKB	Kab. Toba
22,009,074,568		

Tabel T.C 27
Rencana Program, , dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Meningkatnya Keluarga Berkualitas melalui pengendalian kelahiran penduduk			Indeks Ketahanan Keluarga	%	0.61	0.64		0.65		0.66		0.67		0.68		0.68
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	Rata-rata Anak per Wanita	3.61	3.59	335,000,000	3.58	194,250,000	3.57	203,962,500	3.56	214,160,625	3.55	224,868,656	2
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persen	0	25	195,000,000	26	47,250,000	27	49,612,500	28	52,093,125	29	54,697,781	29
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 pilar yang tersusun	Dokumen	0	1	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	sekolah	0	3	45,000,000	3	47,250,000	3	49,612,500	3	52,093,125	3	54,697,781	3
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa	persen	100	100	140,000,000	100	147,000,000	100	154,350,000	100	162,067,500	100	170,170,875	100
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya data pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana	Buku	0	1	75,000,000	1	78,750,000	1	82,687,500	1	86,821,875	1	91,162,969	1
		2.14.02.2.02.14	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan data pengendalian penduduk dan pelayanan KB	Dokumen	0	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	23,152,500	1	24,310,125	1
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	persen	0	30	45,000,000	31	47,250,000	32	49,612,500	33	52,093,125	35	54,697,781	35
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	persen	12.30	12.10	1,938,834,500	11.90	2,479,750,000	11.80	3,372,287,500	11.70	3,750,151,875	11.70	3,952,281,969	100
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan unmet need	persen	n/a	60 (16 Kec & 146 \Desa/Kel)	75,000,000	70 (16 Kec & 170 Desa/Kel)	382,500,000	80 (16 Kec & 195 Desa/Kel)	470,750,000	90 (16 Kec & 219 Desa/Kel)	517,825,000	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)	569,607,500	100 (16 Kec & 244 Desa/Kel)
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Kecamatan	n/a	0	0	0	0	16	50,000,000	16	55,000,000	16	60,500,000	16
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	Kecamatan	0	16	75,000,000	16	82,500,000	16	90,750,000	16	99,825,000	16	109,807,500	16
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Penyediaan sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	0	0	0	16	300,000,000	16	330,000,000	16	363,000,000	16	399,300,000	16
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	persen	57.14	60	735,000,000	61	808,500,000	62	1,189,350,000	63	1,308,285,000	65	1,439,113,500	65
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB oleh PKB/PLKB	Jenis	n/a	0	0	0	0	2	300,000,000	3	330,000,000	5	363,000,000	5
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Persentase Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesetaraan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	persen	n/a	65	500,000,000	70	550,000,000	75	605,000,000	80	665,500,000	90	732,050,000	90
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ratio petugas Pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	persen	100	100	235,000,000	100	258,500,000	100	284,350,000	100	312,785,000	100	344,063,500	100
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	persen	50	60	383,834,500	70	507,000,000	75	841,675,000	80	1,007,636,250	85	978,505,813	85
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya	Pemenuhan Ketersediaan Alokan di Faskes	persen	75	100	50,000,000	100	52,500,000	100	55,125,000	100	57,881,250	100	60,775,313	100
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesetaraan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	persen	76	76	144,000,000	77	150,000,000	78	156,000,000	79	162,000,000	80	168,000,000	80
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan pelayanan KB	jenis	n/a	0	0	0	0	8	400,000,000	8	440,000,000	8	484,000,000	8

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	77.30	77.45	30,000,000	77.50	33,000,000	77.55	36,300,000	77.60	39,930,000	77.65	43,923,000	77.65
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok	Jumlah PUS yang dikonseling tentang Kesehatan Reproduksi	orang	n/a	1600	75,000,000	1600	82,500,000	1600	90,750,000	1600	99,825,000	1600	109,807,500	1600
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan KB mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	0	0	0	25	90,000,000	0	0	25	100,000,000	0	0	25
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan Bergerak	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di Wilayah dan Sasaran Khusus	Gerak	0	4 frek/thn/kec	84,834.500	4 frek/thn/kec	99,000,000	4 frek/thn/kec	103,500,000	4 frek/thn/kec	108,000,000	4 frek/thn/kec	112,000,000	4 frek/thn/kec
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Jumlah MoU/PKS yang di tindaklanjuti unit kerja di DPPKB	MoU/PKS	n/a	5	245,000,000	5	255,000,000	7	265,500,000	9	276,525,000	10	288,101,250	10
		2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB pada Kegiatan Momentum (PKK- KB-Kes, IBI-KB-Kes, TN-KB-Kes)	Jumlah mitra aktif	n/a	6	200,000,000	8	210,000,000	10	220,500,000	12	231,525,000	14	243,101,250	14
		2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Persentase perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam Pembangunan daerah melalui Kampung KB	persen	52.17	55	45,000,000	57	45,000,000	58	45,000,000	59	45,000,000	60	45,000,000	60
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	persen	29.67	29.1	500,000,000	29.05	526,750,000	29	555,012,500	28.95	584,880,625	28.9	616,453,906	28.9
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	persen	8.43	13	500,000,000	15	526,750,000	17	555,012,500	19	584,880,625	21	616,453,906	21
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Sarana dan Prasana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	jenis	n/a	4	35,000,000	5	38,500,000	5	42,350,000	5	46,585,000	5	51,243,500	5
		2.14.04.2.01.04	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (STUNTING)	Jumlah Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang dilatih dan diorientasi	orang	150	384	100,000,000	384	105,000,000	384	110,250,000	384	115,762,500	384	121,550,625	384
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (STUNTING)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi	kelompok	n/a	640	115,000,000	640	120,750,000	640	126,787,500	640	133,126,875	640	139,783,219	640
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Pembinaan Kelompok PIK R dan BKR dalam Edukasi Penyapihan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR).	kelompok	n/a	PIK R = 25; BKR =80	250,000,000	PIK R = 30; BKR =85;	262,500,000	PIK R = 35; BKR =90	275,625,000	PIK R = 40; BKR =95	289,406,250	PIK R = 30; BKR =100	303,876,563	PIK R = 30; BKR =100
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	Persen	56.3	60	86,000,000	62	88,000,000	63	90,000,000	66	92,000,000	68	94,000,000	68
		2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah kelompok keluarga yang mengikuti pemberdayaan ekonomi keluarga	kelompok	18	18	86,000,000	20	88,000,000	23	90,000,000	24	92,000,000	25	94,000,000	35
		2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PENUNJANG KINERJA PERANGKAT DAERAH	%	100%	100%	2,955,094,730	100%	3,535,802,055	100%	3,731,802,157	100%	3,585,798,263	100%	3,858,197,276	100%
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen	85	87	43,500,000	8	45,675,000	89	47,958,750	90	50,356,688	95	52,874,522	95
		2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	30,000,000	7	31,500,000	7	33,075,000	7	34,728,750	7	36,465,188	7
		2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian dan realisasi kinerja	Dokumen	10	10	13,500,000	10	14,175,000	10	14,883,750	10	15,627,938	10	16,409,334	10
		2.14.01.2.02	Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerahan gaji dan tunjangan ASN	%	100	100	2,290,000,000	100	2,404,500,000	100	2,524,725,000	100	2,650,961,250	100	2,783,509,313	100
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	25	2,285,000,000	32	2,399,250,000	33	2,519,212,500	34	2,645,173,125	35	2,777,431,781	36
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan	10	10	5,000,000	10	5,250,000	10	5,512,500	10	5,788,125	10	6,077,531	10
		2.14.01.2.05	Adminstrasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang bersertifikat kompetensi	%	79.07	83.72	-	88.37	30,000,000	93.02	50,000,000	93.02	55,000,000	97.67	95,000,000	97.67
		2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas	stel	0	0	-	0	-	0	-	0	-	35	35,000,000	35

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN (Output)	Satuan Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja Renstra I
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai mengikuti bimtek peraturan perundang-undangan	orang	0	0	0	3	30,000,000	3	50,000,000	3	55,000,000	3	60,500,000	3
		2.14.01.2.06	Adminstrasi umum perangkat daerah	Frekuensi pelayanan administrasi kantor	Bulan	12	12	327,134,730	12	343,491,467	12	360,666,040	12	378,699,342	12	397,634,309	12
		2.14.01.2.06.01	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor per tahun	jenis	7	20	2,980,000	22	3,129,000	24	3,285,450	26	3,449,723	28	3,622,209	30
		2.14.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	50	60	79,500,000	60	83,475,000	60	87,648,750	60	92,031,188	60	96,632,747	60
		2.14.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Jenis	10	10	20,319,200	10	21,335,160	10	22,401,918	10	23,522,014	10	24,698,115	10
		2.14.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk Rapat Koordinasi Bulanan	kotak	0	540	27,000,000	600	28,350,000	660	29,767,500	720	31,255,875	756	32,818,669	756
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan	jenis	10	10	47,335,530	15	49,702,307	17	52,187,422	20	54,796,793	25	57,536,633	25
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	1	3	10,000,000	3	10,500,000	3	11,025,000	3	11,576,250	3	12,155,063	3
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi	orang/bulan	120	120	140,000,000	130	147,000,000	135	154,350,000	140	162,067,500	150	170,170,875	150
		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Bulan	0	0	0	12	350,000,000	12	367,500,000	12	50,000,000	12	107,000,000	12
		2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Unit	0	0	0	1	300,000,000	0	0	2	50,000,000	0	0	0
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Mebel	Jenis	0	0	0	3	50,000,000	0	0	0	3	65,000,000	3	
		2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	0	0	0	0	0	5	125,000,000	0	0	0	0	
		2.14.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	0	0	0	0	0	5	40,000,000	0	0	7	42,000,000	7
		2.14.01.2.08	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Frekuensi penyediaan jasa penunjang	bulan	12	12	170,860,000	12	193,602,988	12	203,993,137	12	214,973,793	12	226,581,582	12
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	2	2	20,860,000	2	21,903,000	3	22,998,150	3	24,148,058	3	25,355,460	3
		2.14.01.2.08.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara per tahun	jenis	-	-	-	48	14,199,988	50	15,619,987	52	17,181,985	55	18,900,184	58
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa Pelayanan umum kantor	orang/bulan	17	17	150,000,000	18	157,500,000	19	165,375,000	20	173,643,750	21	182,325,938	21
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	100	123,600,000	100	168,532,600	100	176,959,230	100	185,807,192	100	195,097,551	100
		2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara per tahun	unit	50	50	123,600,000	52	129,780,000	53	136,269,000	54	143,082,450	55	150,236,573	55
		2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	jenis	0	0	-	2	10,445,600	2	10,967,880	3	11,516,274	3	12,092,088	3
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin kantor terpelihara	jenis	0	0	-	10	15,673,000	10	16,456,650	10	17,279,483	10	18,143,457	10
		2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	0	0	-	2	12,634,000	2	13,265,700	2	13,928,985	2	14,625,434	2
			JUMLAH					###		6,736,552,055		7,863,064,657		8,134,991,388		8,651,801,807	

7841921112

6802499328

2023 hrs lebih tinggi dari tahun yg berikutnya
10,400,000,000 7090419153

7210895845

Balige,
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PE
KABUPHERBET SP. PAS/
NIP. 19660.

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab pada akhir periode Perangkat Daerah
		Rp
18	19	20
	DPPKB	Kab. Toba
133,705,688	DPPKB	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba
0	DPPKB	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba
79,007,906	DPPKB	Kab. Toba
91,162,969	DPPKB	Kab. Toba
24,310,125	DPPKB	Kab. Toba
54,697,781	DPPKB	Kab. Toba
4,052,281,969	DPPKB	Kab. Toba
569,607,500	DPPKB	Kab. Toba
60,500,000	DPPKB	Kab. Toba
109,807,500	DPPKB	Kab. Toba
399,300,000	DPPKB	Kab. Toba
1,439,113,500	DPPKB	Kab. Toba
363,000,000	DPPKB	Kab. Toba
732,050,000	DPPKB	Kab. Toba
344,063,500	DPPKB	Kab. Toba
1,078,505,813	DPPKB	Kab. Toba
60,775,313	DPPKB	Kab. Toba
168,000,000	DPPKB	Kab. Toba
484,000,000	DPPKB	Kab. Toba

ja pada akhir periode Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab	Lokasi
Rp		
43,923,000	DPPKB	Kab. Toba
109,807,500	DPPKB	Kab. Toba
100,000,000	DPPKB	Kab. Toba
112,000,000	DPPKB	Kab. Toba
288,101,250	DPPKB	Kab. Toba
243,101,250	DPPKB	Kab. Toba
45,000,000	DPPKB	Kab. Toba
616,453,906	DPPKB	Kab. Toba
616,453,906	DPPKB	Kab. Toba
51,243,500	DPPKB	Kab. Toba
121,550,625	DPPKB	Kab. Toba
139,783,219	DPPKB	Kab. Toba
303,876,563	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
94,000,000	DPPKB	Kab. Toba
4,010,201,853	DPPKB	Kab. Toba
53,694,989	DPPKB	Kab. Toba
36,465,188	DPPKB	Kab. Toba
17,229,801	DPPKB	Kab. Toba
2,922,684,778	DPPKB	Kab. Toba
2,916,303,370	DPPKB	Kab. Toba
6,381,408	DPPKB	Kab. Toba
95,500,000	DPPKB	Kab. Toba
35,000,000	DPPKB	Kab. Toba

TABEL T.C 28
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				
		2020	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Indeks Ketahanan Keluarga	0.61	0.64	0.65	0.66	0.67	
2	Persentase Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Penduduk	25.71	29.00	31.00	33.00	35.00	
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0.63	0.61	0.60	0.59	0.58	
4	TFR (Total Fertility Rate)	3.61	3.59	3.58	3.57	3.56	
5	Persentase Faskes dan jejaringnya (di seluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	80.76	88.46	92.30	96.15	100.00	
6	Persentase Peserta KB Aktif	77,30	77.45	77.50	77.55	77.60	
7	Persentase Terlaksananya Pelayanan KB Kontrasepsi Mantap	18.81	18.90	18.95	19.00	19.05	
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12.30	12.10	12.00	11.90	11.80	
9	Tingkat Penurunan Angka Kelahiran pada Remaja Usia 15-19 Thn (ASFR 15-19 thn)	0.31	0.29	0.28	0.27	0.26	
10	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29.67	29.10	29.05	29.00	28.95	
11	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber-KB	52.6	54.00	55.00	56.00	57.00	
12	Persentase PUS Anggota Kelompok BKR yang ber-KB	49.1	53.00	55.00	57.00	59.00	
13	Persentase PUS Anggota Kelompok BKL yang ber-KB	38.2	42.00	44.00	46.00	48.00	
14	Persentase Kelompok UPPKS yang ber-KB Mandiri	56.3	60.00	62.00	64.00	66.00	
15	Persentase Kelompok PIK R/M	100	100	100	100	100	
16	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	24	24	24	24	24	

.N RPJMD

I TOBA

	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2026	
8	9
0.68	0.68
37.00	37.00
0.57	0.57
3.55	3.55
100.00	100.00
77.65	77.65
19.10	19.10
11.70	11.70
0.25	0.25
28.90	28.90
58.00	58.00
61.00	61.00
50.00	50.00
68.00	68.00
100	100
24	24

TABEL T.C 29
 INDIKATOR PROGRAM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOBA

NO	PROGRAM	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	Target Capaian Seti		
			2020	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun.	3.61	3.59	3.58	3.57
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (unmeet need)	12.30	12.10	12.00	11.90
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	29.67	29.10	29.05	29.00
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100

Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
2025	2026	
8	9	10
3.56	3.55	3.55
11.80	11.70	11.70
28.95	28.90	28.90
100	100	100